



**Group Photo 1:** *Kabupaten Cirebon, khususnya kecamatan Cirebon Utara, merupakan wilayah yang memiliki potensi laut maupun pertanian. Desa Mertasinga sering dikenal pula dengan 'desa Bondet' merupakan komunitas nelayan, sedang Desa Buyut lebih dikenal sebagai komunitas petani padi sawah (Photograph by HS).*



**Group Photo 2:** *Bank Rakyat Indonesia beserta unit-unit pelayanannya yang tersebar di daerah pedesaan (BRI Unit) masih belum mampu mengisi gap permintaan akan kredit di daerah pedesaan. Bahkan sebaliknya, keberhasilan dalam memobilisasi dana masyarakat sering dituduh melakukan 'capital flight' dana pedesaan ke kota (Photographs by HS).*



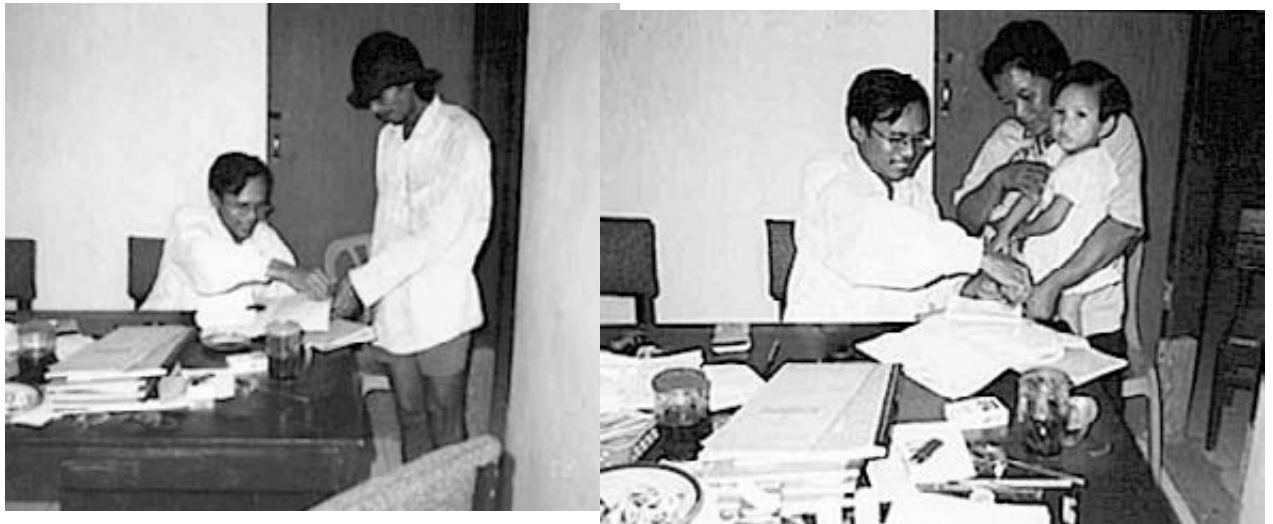
**Group Photo 3:** *Usaha-usaha produktif seperti pembuatan perahu, pengupasan rajungan dan kerang atau pengeringan ikan asin dan usaha sejenis lainnya di pedesaan 'terpaksa' tidak dapat dilayani oleh perbankan karena tidak memiliki sertifikat tanah dan/atau usaha yang secara administratif dipersyaratkan sebagai jaminan tambahan (collateral) untuk mengajukan pinjaman (Photographs by HS).*



**Group Photo 4:** *Kelompok masyarakat berpenghasilan teratur (regular income group) di perdesaan adalah 'nasabah' para pelepas uang yang sering disebut sebagai "bank keliling", "bank harian", "bank kosipa" yang beroperasi secara agresif di desa. Peminjam pada umumnya bekerja sebagai buruh di pabrik pengupasan kerang, rajungan maupun pabrik industri rotan atau pekerja jasa yang memperoleh upah atau pendapatan secara harian atau mingguan sehingga mereka 'mampu' menyediakan angsuran secara harian dan/atau mingguan (Photographs by HS).*



**Group Photo 5:** Banyak yayasan dari berbagai perkumpulan yang mempunyai bidang usaha koperasi simpan pinjam (Kosipa) dengan mendapatkan izin usaha dari Departemen Koperasi. Namun demikian, sering ditemui adanya perorangan yang melakukan praktek rentenir dan bernaung di bawah lembaga resmi koperasi semacam itu (Photograph by HS).



**Group Photo 6:** *Badan Kredit Desa (BKD) merupakan alternatif lembaga keuangan di desa yang sangat potensial dikembangkan secara lebih profesional. Pengelola yang adalah orang desa setempat dan dibantu secara teknis oleh petugas BRI serta penerapan prosedur pinjaman yang sederhana sangat diminati oleh masyarakat pedesaan. Namun, keberadaan permodalan BKD yang terbatas masih belum memungkinkan BKD untuk mampu menjangkau lebih banyak peminjam (Photographs by HS).*



**Group Photo 7:** *Penampilan pelayanan BKD yang sederhana membuat suasana dekat dan akrab dengan masyarakat perdesaan* (Photographs by HS).



**Group Photo 8:** *Profil pelayanan BKD yang sederhana mampu menghilangkan 'rasa takut dan rendah diri' masyarakat pedesaan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan yang lokal (Photographs by HS).*





**Group Photo 9:** *Ketika orang tua sebagai peminjam tidak sempat atau berhalangan, penyetoran angsuran pinjaman dapat 'diwakilkan' kepada anak-anaknya. Kondisi ini sekaligus memberikan nilai tambah akan pengetahuan perbankan kepada anak-anak sejak dini (Photograph by HS).*



**Group Photo 10:** *Tanaman padi yang subur dan siap dituai tidak selalu paralel dengan perbaikan kesejahteraan petani. Pengelolaan program KUT yang kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani menjadikan pelaksanaannya sarat dengan potensi penyimpangan. Diperlukan adanya kredit pertanian bersifat tepat dan sesuai dengan kebutuhan petani, dan dikelola secara individual melalui sistem perbankan profesional (Photographs by HS).*



**Group Photo 11:** *Kredit program bagi nelayan sering mengalami kegagalan . Nelayan sering dianggap 'layak kredit' (credit worthy) manakala mereka mampu menyediakan jaminan tambahan. Namun dalam kenyataannya pinjaman itu akhirnya juga tetap menciptakan tunggakan yang tinggi. Diperlukan adanya pola kredit yang akomodatif dengan karakteristik kegiatan melaut dan pola pendapatan nelayan (Photographs by HS).*



**Group Photo 12:** *Adanya perbaikan pasar daging rajungan telah menciptakan munculnya banyak usaha pengupasan rajungan di desa. Persaingan antar pengusaha untuk memperoleh kelangsungan bahan baku telah menyebabkan adanya fasilitas permodalan secara vertikal berjenjang mulai dari nelayan, bakul, pengepul sekaligus pengusaha pengupas rajungan dalam bentuk miniplant di desa serta dengan pengusaha pada skala besar di luar kota (vertical business network). Adanya fasilitas perbankan yang baik akan meningkatkan 'bargaining position' nelayan dan bakul kecil di desa dalam menentukan harga jual bahan baku rajungan pada tingkat yang lebih menguntungkan mereka (Photographs by HS).*

## Nelayan Bondet Harapkan Bantuan Modal

20-21 06 00

**CIREBON UTARA.**- Kalangan nelayan yang biasa beroperasi di kawasan Bondet Desa Mertasinga Kecamatan Cirebon Utara, mengharapkan perhatian pemerintah (membantu memberdayakan mereka, khususnya di bidang permodalan.

Menurut beberapa nelayan yang ditemui seusai melaut Sabtu (17/6), mereka berharap bisa bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, hal itu terbentur berbagai persoalan yang ada. Mereka berharap, pemerintah membantu menyelesaikan berbagai persoalan itu.

Kurdi, satu dari sekitar 2.000 nelayan yang biasa beroperasi di kawasan Bondet, mengatakan, persoalan utama yang dihadapi adalah minimanya modal. Akibatnya,

mereka hanya bisa melaut dengan kemampuan terbatas, antara lain kecilnya ukuran perahu yang digunakan. Hal itu jelas membatasi jumlah tangkapan ikan atau kerang.

Menurutnya, untuk membeli perahu dengan ukuran lebih besar, jelas berat. Sebagai contoh, perahu ukuran sedang saja harganya mencapai sembilan juta rupiah. "Kami ini sulit memegang uang dalam jumlah besar. Karena itu, harga sekian tidak mungkin kami jangkau tanpa bantuan pihak lain, khususnya pemerintah," kata Kurdi.

### Tangkapan terbatas

Dikatakan, dengan jumlah tangkapan terbatas, kalangan nelayan juga harus mau menjual hasil tangkapan kepada bakul. Meskipun tidak memuaskan, tapi itu lebih realistis daripada menjual kepada pihak lain,

khususnya koperasi. Bakul, masih sanggup membayar ikan rata-rata Rp 9.000,00/kg. Sementara koperasi hanya Rp 7.000,00/kg.

Sementara itu Hadi, sesama nelayan, juga mengharapkan bantuan pemerintah, khususnya dalam bentuk kucuran modal kerja, agar nelayan dapat bekerja dengan baik tanpa terbebani utang-piutang dengan bakul atau semacamnya.

Menurutnya, pada masa kepemimpinan bupati terdahulu (H. Rachmat Djoehana-red), kalangan nelayan Bondet sempat berbesar hati. Saat kedatangan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah ke kawasan itu beberapa waktu lalu, sempat terlontar janji membantu meningkatkan taraf hidup nelayan setempat dijanjikan bantuan. (R-03)

11-12 07 00

Untuk Wilayah Pantura Mencapai Rp 35 Miliar

## Kredit Nelayan Cair Agustus

**KEJAKSAN.**- Direktur Jendral Pantai, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (ELP), Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms menegaskan, pemerintah RI dalam waktu dekat akan merealisasikan kredit sebesar Rp 35 miliar untuk para nelayan di pantai utara wilayah III Cirebon.

Kebijakan itu merupakan bagian dari pemberian kredit untuk nelayan di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai angka lebih dari Rp 700 miliar.

Penegasan itu disampaikan Dirjen dalam Seminar Nasional 2 Hari Implementasi UU no 22 dan 25 tahun 1999 dalam rangka mewujudkan demokratisasi hubungan pusat-daerah, yang digelar Ikatan Mahasiswa Gunung Jati (Imagati) di Hotel Kharisma, Senin-Selasa (10-11/7). Selain Rokhmin, hadir pula sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, Dosen Fakultas IISIP Universitas Jember, Dr H Uung Nasdia, Ms.

Dikatakan Rokhmin, secara umum pemberian kredit untuk nelayan di seluruh Indonesia itu akan direalisasikan melalui program

Permodalan Nasional mandiri (PNM), yang pada pelaksanaannya disalurkan melalui Kredit Koperasi Peruntukan Anggota (KKPA). Program itu merupakan realisasi kerjasama antara Departemen ELP dengan Bank Mandiri. Jumlah yang dialokasikan dapat mencapai Rp 50 juta per anggota.

Pihak Departemen ELP sendiri saat ini telah berjuang keras untuk dapat merealisasikan rencana itu dengan cara melakukan pendekatan maksimal kepada pihak Bank Mandiri. Sejumlah prosedur pengajuan telah berhasil diselesaikan sehingga pihak Bank Mandiri mau menandatangani kesepakatan tentang kredit itu. "Oleh karena segala sesuatu yang menjadi ganjalannya sudah berhasil dilalui, meskipun dengan perjuangan berat, maka saat ini saya sendiri sudah dapat memperkirakan bahwa paling lambat dana itu akan cair Awal Agustus mendatang," paparnya.

### Paling tinggi

Berkaitan dengan pencairan itu, lanjut Rokhmin, khusus untuk nelayan di Wilayah III Cirebon, pihak Dirjen P3K bahkan menempatkannya mendapat skala prioritas

paling tinggi. Hal itu erat kaitannya dengan permintaan Menteri ELP, Sarwono Kusumaatmaja sendiri kepada Dirjen P3K, agar nelayan di pantura Jawa Barat, khususnya Wilayah III Cirebon diutamakan. "Permintaan Pak Menteri itu bahkan direkomindir pula oleh Presiden Gus Dur," katanya.

Di bagian lain Rokhmin juga mengemukakan, pemberian kredit bunga ringan kepada para nelayan itu sebenarnya sempat diupayakan agar dapat memiliki kemudahan seperti halnya Kredit Usaha Tani (KUT) yang bunganya hanya 10,4% per tahun. Namun karena situasi perekonomian nasional saat ini masih terhitung belum sepenuhnya membaik, ditambah kondisi perbankan juga masih berada dalam keterpurukannya, upaya negosiasi dengan pihak bank tidak dapat menggolkan permintaan itu. Bank Mandiri pun akhirnya hanya bersedia menurunkan bunga pinjaman khusus untuk program tersebut hingga 16% per tahun. "Namun demikian angka itu tentu masih tetap jauh lebih kecil dibanding bila nelayan meminjam dari rentenir dan sebangsanya," katanya. (R-15)

# BMT Belum Mampu Geser Rentenir ✓

Sumber, RC 120700

Sepertinya cukup sulit merubah sikap mental masyarakat ekonomi lemah agar tidak lagi berhubungan dengan para rentenir ketika membutuhkan dana tetapi beralih ke lembaga Baitul Mal Watamwil (BMT).

Menurut Manager Unit Simpan Pinjam (USP) BMT Al Falah Sumber, Tarjodipuro SE, ada beberapa hal yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang berhubungan dengan para rentenir daripada berhubungan dengan BMT, diantaranya karena terbatasnya modal dan sumberdaya manusia yang dimiliki BMT.

Sehingga cukup sulit untuk menalahkan para rentenir yang memiliki permodalan cukup banyak, ditambah lagi SDM mereka cukup terlatih dalam menggaet masyarakat.

Alasan lainnya, masyarakat masih menganggap untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga perekonomian seperti BMT birokrasinya terlalu panjang dan bertele-tele sehingga mereka yang membutuhkan bantuan permodalan atau bertransaksi tidak dapat melakukannya dengan cepat. Sementara itu, bila berhubungan dengan rentenir menurut mereka cukup singkat transaksinya.

Sementara itu bila dilihat dari kacamata masyarakatnya sendiri, mereka masih belum memahaminya prinsip efisiensi dan efektifitas perhitungan dagang.

"Meskipun, keuntungan yang diambil oleh para rentenir dari (usaha) mereka cukup besar, masyarakat ekonomi lemah khususnya para pedagang tetap bertahan untuk berhubungan dengan para rentenir itu," katanya.

Saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah pihak seperti oleh pemerintah dan pihak swasta untuk memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya dengan mendirikan koperasi atau BMT seperti yang telah dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Banyak berdirinya koperasi dan BMT, sebenarnya secara tidak langsung telah berusaha dan berhasil membantu masyarakat ekonomi lemah, seperti: para pedagang, kuli jasa, petani dan pegawai kecil melalui produk-produk yang ditawarkannya.

"Hal itu secara tidak langsung BMT berusaha membantu masyarakat ekonomi lemah untuk tidak lagi berhubungan dengan para rentenir," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Tarjo-

dipuro, misi yang diemban BMT yang dipimpinnya adalah berusaha dengan modal dan sumber daya manusia yang ada berusaha dapat membantu masyarakat. "Sehingga yang diutamakan oleh BMT-nya adalah social oriented bukan profit oriented semata," tandasnya.

Beberapa produk jasa yang biasanya ditawarkan BMT seperti yang dipimpinnya berkaitan dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat, diantaranya: pinjaman musyarokah (penambahan/penyertaan modal usaha), pinjaman mudhorobah (pinjaman modal penuh kepada orang yang memiliki keahlian), murobahah (penyertaan/penambahan modal dengan waktu pengembalian ditentukan BMT) dan pinjaman bait bitaman azil (BBA) atau jual beli yang dilakukan dengan dua kali akad. Produk-produk yang ditawarkan BMT tersebut kata Tarjodipuro, secara keseluruhan menggunakan sistem bagi hasil.

"Meskipun masyarakat masih suka berhubungan dengan rentenir, BMT dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimilikinya berusaha memberikan bantuan modal kepada masyarakat dengan syarat semudah dan seringan mungkin, ujar Tarjodipuro. (eko)

# Tekankan Program Pertanian Mikro

Jakarta, Kompas 2907 '00

Sampai 15 tahun ke depan, pertanian masih akan menjadi prioritas utama. Pertanian harus mendapatkan perhatian serius, karena 60 persen penduduk Indonesia petani. Departemen Pertanian (Deptan) harus mengerti karakter dan budaya petani agar bisa mengembangkan pertanian ke arah pertanian modern.

Untuk itu, Deptan harus segera menyusun program mikro pertanian, dan jangan lagi membuat program-program pertanian makro yang muluk-muluk. Demikian pernyataan Presiden KH Abdurrahman Wahid dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Pertanian (Deptan), di Jakarta, Jumat 28/7.

Ditegaskan, keberhasilan makro tidak akan terjadi tanpa program-program mikro. "Jangan lagi membuat program makro, apalagi program yang

muluk-muluk," kata Presiden.

Menteri Pertanian M Prakosa sendiri mengakui, selama ini Deptan terlalu banyak melaksanakan program makro, sehingga tujuan pembangunan pertanian justru tidak tercapai. Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan menyusun program pembangunan pertanian yang mengacu pada program mikro. Program ini diharapkan akan lebih menguntungkan petani.

## Program konkret

Dalam jangka pendek, kata Mentan, Deptan akan menjabarkannya lebih lanjut dalam agenda yang dirinci dalam program konkret. "Contoh program konkret itu adalah *corporate farming*," ujarnya.

Menurut Prakosa, *corporate farming* akan dapat dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, pangan harus disubsidi peme-

rintah melalui pola Kredit Koperasi (KKop) yang merupakan skema khusus. Kedua, kredit agribisnis dengan pola khusus seperti Kupedes (Kredit Umum Pedesaan), khususnya untuk membiayai kredit peternakan, perikanan, bahkan pembuatan kios-kios pertanian.

Untuk itu, Deptan saat ini tengah menyiapkan program integratif, yang merupakan gabungan dari konsep korporasi pertanian, skim kredit yang mengacu pada sistem Kupedes dan peningkatan ekspor melalui terminal agrobisnis.

Menteri Pertanian menjamin skim kredit di masa depan akan lebih fleksibel dan tepat sasaran, karena tidak lagi melalui tangan kedua atau ketiga. Apalagi BRI sudah menyatakan kembali ke *khittah* sebagai bank yang khusus membantu kepentingan rakyat, khususnya petani. (p09/gun)

# Banyak Dana KUT tidak Sampai ke Petani

Jember, Kompas 29/7/00

Para camat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan berbagai penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha tani (KUT), apakah itu terjadi di pengurus koperasi, penyalur (recrating) maupun dilakukan oleh kelompok tani. Sekitar 30 persen dari plafon yang telah disetujui kreditnya tidak dicairkan ke kelompok tani, demikian pula sekitar 30 persen yang telah diterima kelompok tani tidak sampai ke petani.

Hal itu terungkap pada rapat koordinasi Satpel Bimas (Satuan Pelaksana Bimbingan Masyarakat) tingkat kecamatan, kabupaten dan penyalur yang dipimpin Wakil Bupati Jember Drs Bagong Sutrisnadi, di Jember, Jumat (28/7).

Sementara itu di Sumatera Barat, meski sudah mengerahkan pihak kejaksaan untuk menagih, tunggakan kredit usaha tani (KUT) di propinsi ini relatif tinggi, mencapai Rp 76,74 milyar atau 65,54 persen dari nilai realisasi KUT Belakangan, para petani di daerah itu enggan memanfaatkan dana bergulir

BUMN untuk KUT senilai Rp 10 milyar.

"Tingginya tunggakan KUT di Sumbar karena oknum yang menyalahgunakan KUT belum ada dikenai tindakan hukum, sehingga mempengaruhi penunggak lainnya. Juga karena manajemen fee KUD yang dibayar setelah kredit lunas sehingga KUD tidak mampu menagih dengan baik," kata Nazar AR, Kepala Kanwil Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Sumbar, Jumat, di Padang.

## Kosong

Di Jember malah ada penyalur yang ketika minta tanda tangan camat untuk dicantumkan di RDKK, ternyata belum mencantumkan nama petaninya. "Banyak alasan dikemukakan penyalur ketika hendak minta tanda tangan, antara lain karena camat sulit dicari atau sedang tidak di tempat," kata Camat Jenggawah Drs Hasyim Maani. Begitu pula pada saat pencairan, camat tidak diberitahu berapa besar kreditnya dan dibagikan kepada berapa kelompok tani. Sebaliknya, ketika terjadi

tunggakan malah kepala wilayah yang ditekan agar memotivasi petani supaya segera melunasi tunggakan KUT. Ketika ditanyakan ke petani, mereka tidak segera melunasi kredit sebab saat pencairan kredit petani mengaku hanya dapat separuh dari plafon.

H Muchlis, ketua KUD Marem Kecamatan Panti menolak tuduhan para camat yang diwakili Camat Jenggawah Hasyim Maani sebagai juru bicara. "Tuduhan Pak Camat itu tidak semuanya benar. Kami bahu-membahu dengan Camat Panti mendatangi petani memotivasi agar segera melunasi kredit," katanya.

Sampai dengan 15 Juli lalu, dari KUT yang tersalurkan sebesar Rp 52 milyar pada musim tanam 1998/1999 baru terbayar Rp 22 milyar atau sekitar 57 persen. Sedangkan realisasi KUT musim tanam 1999/2000 tersalurkan sebesar Rp 64 milyar dan jumlah tunggakan Rp 56,1 milyar.

## Tunggakan Sumbar

Menurut Nazar AR, tunggakan Rp 76,74 milyar itu merupa-

kan kumulatif sejak musim tanam tahun 1995 sampai musim tanam 1999. Dari Rp 117,09 milyar KUT yang direalisasikan, yang dikembalikan oleh petani baru Rp 39,56 milyar.

Dari 14 daerah tingkat II, tunggakan terbesar terdapat di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisirselat, dengan nilai tunggakan masing-masing Rp 22,32 milyar, Rp 17 milyar, dan Rp 13 milyar. "Ke depan pencairan KUT akan dilaksanakan dalam pelayanan satu atap," tandasnya.

Kepada pihak penyalur/pelaksana KUT, Kanwil Koperasi dan PKM Sumbar itu menyarankan, untuk realisasi KUT tahun-tahun berikutnya, supaya tidak terganggu dengan persyaratan tunggakan maksimal 25 persen, sebaiknya yang dinilai bukan koperasinya tetapi kelompok-kelompok tani.

"Selama ini banyak terjadi sebagian kelompok tani telah lunas, tetapi tunggakan koperasi 30 persen. Akibatnya, kelompok tani yang lunas tidak dibolehkan mendapat KUT lagi," ungkap Nazar AR. (siz/na)

# Ada Keengganan Petani Jabar Kembalikan KUT

Bandung, Kompas 25/07/00

Penyaluran dan pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) di Jawa Barat dalam tahun penanaman (TP) 1998/1999 kurang mengembuskan. Dari sisi penyaluran terjadi penyimpangan sebesar Rp 47,33 milyar dari total penyaluran Rp 1,56 triliun. Sementara untuk pengembalian, hingga posesi 31 Maret 2000 hanya mencapai Rp 299,133 milyar.

Gubernur Jabar R Nuriana mengungkapkan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD hari Senin (24/7). Acara itu untuk mendengar jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Jabar terhadap Bertanggungjawab Gubernur Tahun Anggaran 1999/2000. Rapat dipimpin Wakil Ketua Dewan, Suyaman. Hingga pukul 16.00, rapat paripurna

masih berlangsung.

Jawaban gubernur setebal 202 halaman, masing-masing dibacakan Nuriana untuk bidang kebijakan dan pemerintahan sebanyak 100 halaman. Selebihnya oleh Wakil Gubernur Soedarna, khusus menyangkut permasalahan ekonomi dan pembangunan, serta Wakil Gubernur Dedem Rochlis membacakan jawaban gubernur yang menyangkut kesejahteraan.

Nuriana mengatakan, penyebab rendahnya pengembalian KUT adalah harga beberapa komoditas pertanian yang dibayar KUT saat panen sangat rendah, sementara biaya produksi sangat tinggi. Soal lainnya, keengganan petani mengembalikan kredit karena tidak ada jaminan memperoleh kredit tahun berikutnya. Itu dibuktikan dari

jumlah plafon untuk tahun 1999/2000 yang disediakan pemerintah hanya sebesar 0,17 persen dari plafon tahun sebelumnya Rp 2,358 triliun.

## 206 unit kendaraan

Menyenggung penghapusan kendaraan beroda empat sebanyak 206 unit dengan menjualnya rata-rata seharga Rp 2,5 juta, Nuriana mengatakan, langkah itu dilakukan karena sebagian kendaraan rusak. Penghapusan dilakukan untuk kendaraan tahun 1991 ke bawah yang sudah dipergunakan delapan tahun lebih, kecuali kendaraan yang rusak berat karena terbakar.

Menurut gubernur, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1971 menyatakan, kendaraan yang berusia 5-7 tahun memiliki har-

ga jual 40 persen dari harga umum yang berlaku. Sementara kendaraan berusia delapan tahun nilainya 20 persen dari harga umum.

Diungkapkan, nilai kendaraan yang dibapaskan mengacu pada Keputusan Mendagri No 16 Tahun 1999 tertanggal 22 Maret 1999 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 1999. Sementara tata cara penjualan kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Mendagri No 7 Tahun 1997 yang tidak mengharuskan penjualan melalui lelang. Permendagri ini juga mengatur penjualan dapat langsung kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya lima tahun dan diprioritaskan kepada pemegang kendaraan. (pin)



# Lagi, KUT Rp 1,65 Milyar Diselewengkan ✓

Palembang, Kompas 25/07/00

Diduga menyewengkan dana kredit usaha tani (KUT) sebesar Rp 1,65 milyar, empat pengurus Koperasi Lamanis Rambutan, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan seorang penyuluh pertanian OKI ditahan oleh Tim Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya itu, koperasi ini membentuk beberapa kelompok tani dan rencana definitif kerja koperasi (RDKK) yang fiktif.

Kepala Direktorat Reserse Polda Sumsel, Senior Superintendent (Kolonel Polisi) Erwin PL Tobing, ketika menjelaskan hal itu, Senin (24/7), di Palembang mengemukakan, kelima

orang tersebut masing-masing Ir Dah S Sos (41), Suk (35), Zai (52), Zain (39) dan Fik (41). Menurut dia, ketua koperasi, Has, masih dicari, sedangkan seorang tersangka lainnya, Sersan Satu Pah, anggota Koramil Rambutan, ditangani Denpom Palembang.

Sampai saat ini polisi baru menyita uang kontan sebanyak Rp 44.200.000, sebidang perkebunan karet milik Sertu Pah, empat traktor tangan dan pupuk sebanyak delapan ton.

Tobing mengungkapkan, modus operandi penggelapan uang negara ini dimulai dengan membuat RDKK fiktif. Orang-orang yang terlibat dalam anggota kelompok, luas lahan dan lokasi lahan yang tercan-

tum, ternyata tidak ada. Untuk memuluskan langkahnya, Dah yang merupakan penyuluh pertanian Kecamatan Inderalaya, OKI, memberi rekomendasi bahwa kegiatan koperasi itu benar.

## Usut tuntas

Berdasarkan RDKK ini, Koperasi Lamanis kemudian mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Bukopin setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Koperasi (Kandepkop) OKI tanggal 17 September 1999. Sepuluh hari kemudian dana Rp 1,65 milyar mengucur dari bank dimaksud.

Kepala Dinas Koperasi Sumsel Muzni Djalil yang dihubungi terpisah, mempersilahkan

polisi mengusut penyelewengan sampai tuntas. Dia juga meminta polisi menyelidiki dugaan adanya anggota Kandepkop OKI yang terlibat pengucuran dana itu.

"Kita memang sudah mengetahui kasus ini tengah ditangani polisi. Bagi saya setiap anggota saya yang terlibat harus mendapat ganjaran hukum," ujarnya.

Senantiasa itu, Komandan Denpom Palembang Mayor (CPM) Heri Sukaryanto membenarkan Sertu Pah merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penggelapan uang negara ini. Namun, Pah belum ditahan karena yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian. (sah)

# PETA WILAYAH KECAMATAN CIREBON UTARA

SKALA = 1 : 50.000



- : KANTOR KECAMATAN
- : BALAI DESA
- : SUNGAI
- - - : BATAS DESA
- : JALAN NASIONAL
- : JALAN KABUPATEN
- : JALAN DESA
- : JALAN KERETA API

